

Judul : Cuaca ekstrem belum usai, DPR minta semua waspada
Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Cuaca Ekstrem Belum Usai DPR Minta Semua Waspada

DPR meminta Pemerintah mengantisipasi potensi bencana susulan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

PERMINTAAN tersebut menyusul masih tingginya ancaman bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat, angin kencang, banjir bandang, hingga banjir rob di wilayah pesisir di berbagai daerah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania mengatakan, peringatan BMKG sejak awal Desember 2025 mesti menjadi perhatian penuh. "Perkuat sistem peringatan dini. Informasi harus sampai ke masyarakat lebih awal, dan edukasi kesiapsiagaan, terutama di desa-desa rawan harus menjadi prioritas," ucapnya, kemarin.

Dini menegaskan, penanganan kebencanaan tidak boleh bersifat reaktif. Negara harus hadir sebelum bencana terjadi, bukan hanya setelah korban berjatuhan. Karena di balik setiap data korban, terdapat masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga.

Dini menekankan, penanganan bencana harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Seperti penanganan banjir di

Bali yang telah mendapatkan perhatian melalui penyaluran bantuan logistik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan santunan kepada keluarga korban. Prinsip yang sama harus diterapkan di seluruh daerah terdampak bencana tanpa terkecuali," tegas politikus Nasdem ini.

Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan berikutnya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain perbaikan sistem drainase, penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan, dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang lebih terintegrasi dengan dukungan BMKG dan Pemda.

Dia bilang, penanganan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah, seperti Cilacap dan Semarang, perlu langkah konkret. Seperti perluasan kolam retensi, pembangunan infrastruktur pengendali air di lokasi rawan banjir kronis, serta penguatan kapasitas masyarakat pesisir dan bantaran sungai. "Caranya, melalui pelatihan dan simulasi evakuasi. Karena tidak ada satu daerah pun yang dibiarkan sendirian," tegasnya.

Penanganan bencana, lanjutnya,



Dini Rahmania

harus dilakukan secara terintegrasi. Mulai dari evakuasi cepat, penyaluran bantuan kebutuhan dasar, hingga layanan kesehatan pasca-bencana di pengungsian. Karena itu, Komisi VIII DPR mempercepat revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Revisi tersebut akan memperkuat kewenangan BNPB agar mampu memimpin koordinasi penanggulangan bencana secara efektif. Revisi tidak boleh berhenti pada penyusunan pasal demi pasal. Sebab ini adalah ikhtiar negara untuk memastikan setiap keluarga terdampak memiliki perlindungan hukum yang kuat, respons yang cepat,

dan koordinasi yang jelas.

Sementara, anggota DPR Nasir Djamil memperkirakan Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status bencana nasional di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar pada minggu pertama tahun 2026. Sebab ketiga provinsi itu hingga kini kondisinya belum pulih dari bencana.

"Status itu layak ditetapkan Pemerintah bagi tiga provinsi itu karena parahnya kondisi di sana," kata Nasir dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).

Nasir menegaskan siapa pun yang sudah menengok langsung ke lokasi bencana akan berpendapat serupa. Sebab fakta objektifnya sangat mengerikan dan memilukan siapa pun yang melihatnya secara langsung.

Dengan itu ia meyakini penetapan status bencana nasional akan bermanfaat luas dalam penanganan hingga pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Sehingga tak perlu ada yang menaruh curiga dengan maksud lain di balik penetapan status itu.

"Penetapan status bencana nasional untuk Sumatera dimaksudkan untuk mempercepat proses pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar politikus PKS ini.

Sebenarnya, kata Nasir, Pemerintah tak punya hambatan berarti untuk menetapkan status bencana nasional di Sumatera.

Sehingga penetapan status bencana nasional tinggal menunggu waktu saja. "Uang ada, personel ada, aturan juga tersedia," imbuh anggota Komisi III DPR ini.

Terpisah, Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani membeberkan kondisi cuaca memasuki periode 29 Desember 2025–1 Januari 2026. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat masih dapat terjadi di Aceh, Sumut, Bengkulu, dan NTB, disertai potensi angin kencang di beberapa wilayah lainnya.

"Kondisi ini dinilai berisiko terhadap keselamatan perjalanan, terutama transportasi laut dan udara yang kerap meningkat saat musim libur panjang," ujar Andri di Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Selain itu, BMKG bersama BNPB terus menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah terdampak bencana, di Aceh, Sumut dan Sumbar. Operasi ini terbukti efektif menurunkan intensitas curah hujan antara 12 hingga 20 persen. Sehingga membantu kelancaran evakuasi, pembersihan material banjir dan longsor, serta perbaikan infrastruktur.

"Operasi modifikasi cuaca akan diaktifkan secara adaptif, mengikuti dinamika atmosfer. Tujuannya agar proses pemulihan di lapangan tidak terganggu oleh hujan dengan intensitas tinggi," tutup Andri. ■ TIF